

BAB II

KONDISI UMUM SUKABUMI AWAL KEMERDEKAAN

2.1 Kondisi Geografis Sukabumi

Sukabumi merupakan wilayah yang berkedudukan di pulau Jawa dan secara Administrasi terbagi atas wilayah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Secara astronomis wilayah Kota Sukabumi terletak pada $106^{\circ} 45' 50''$ Bujur Timur dan $106^{\circ} 45' 10''$ Bujur Timur, $6^{\circ} 49' 29''$ Lintang selatan dan $6^{\circ} 50' 44''$ Lintang Selatan.¹ Kabupaten Sukabumi mengelilingi wilayah Kota sukabumi dan ujung barat ke timur maupun ujung selatan ke Utara. Wilayah Sukabumi berada di sisi barat pulau Jawa dekat dengan Ibukota Negara berjarak 120 Km dan Ibukota Provinsi Jawa Barat berjarak 96 Km. Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Cianjur di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Lebak di Barat, serta Kabupaten Bogor di utara. Luas wilayah Sukabumi berjumlah 3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten dengan luas terbesar di Jawa Barat. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40% berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu + 419.970 ha dengan mayoritas wilayah berupa hutan.²

Wilayah Sukabumi memiliki kontur tanah yang beragam dengan dikelilingi beberapa gunung, di antaranya: Gunung Halimun, Gunung Salak,

¹ Oscar Lenusa, *Selayang Pandang Kota Sukabumi*. Sukabumi : PDE Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi. 2011. hlm. 2

² Disjarahdam, *Op. Cit.* 22

dan Gunung Gede sebagai yang tertinggi. Dengan beberapa sungai yang mengalir di antaranya Sungai Cimandiri dan Sungai Cikaso yang bermuara di Samudra Hindia.

Kabupaten Sukabumi semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cianjur. Sejarah kelahirannya dimulai sejak tahun 1776, pada masa pemerintahan Bupati Cianjur yang ke-6, yaitu Wiratanudatar VI yang berkedudukan di Cikole. Tahun 1872,³ wilayah ini dibuka untuk area perkebunan teh dan karet oleh Belanda. Pembudidayaan teh berada di Wilayah Selabintana dan Goalpara, secara Administratif berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Sebelum berstatus kota, Sukabumi hanyalah dusun kecil bernama "Goenoeng Parang" (sekarang Kelurahan Gunungparang) lalu berkembang menjadi beberapa desa seperti Cikole atau Parungseah. Lalu pada 1 April 1914,⁴ pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota Sukabumi sebagai Burgerlijk Bestuur dengan status Gemeente (Kotapraja) dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang istimewa.

³ Disjarahdam, *Op. Cit.* 19

⁴ Setia Nugraha. *Kota Sukabumi, Dari Distrik Menjadi Gemeente (815-1914)*. Bandung: Jurnal Patajala Vol. 9, No. 3. 2017. hlm. 424

2.2 Kondisi Sikap Masyarakat Sukabumi Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Bulan Agustus menjadi memori yang akan terekam dalam panggung sejarah dunia, Republik Indonesia lahir atas keluarnya dari kemelut penjajah. Pada saat itu Jepang sedang melakukan penjajahan terhadap Hindia Belanda. Bulan Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. Informasi kekalahan ini ditutup-tutupi oleh pemerintah pendudukan militer Jepang agar tidak diketahui oleh rakyat di daerah jajahannya yang nantinya mengakibatkan respon untuk mengusir kedaulatan di wilayah jajahannya. Kalangan pergerakan nasional Republik Indonesia yang bergerak di bawah tanah dapat mengetahuinya dari siaran radio luar negeri yang didengarkan secara sembunyi. Pengumuman penyerahan tidak bersyarat Jepang kepada Sekutu yang diumumkan oleh Presiden Truman tanggal 14 Agustus 1945 dapat ditangkap melalui siaran radio.

Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia diumumkan oleh Soekarno Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Semarak kemerdekaan ini walau mulai dikumandangkan dari Jakarta, informasi proklamasi belum terakses secara merata ke seluruh kota. Ketidaksempurnaan hubungan komunikasi dan perangkat yang mendukungnya melandasi dan usaha Jepang untuk menghalangi tersebarnya berita tersebut.

Sekitar pukul 11.15 hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 berita proklamasi kemerdekaan (dalam Edi S. Ekadjati, 1980/1981:78) diterima oleh

kantor berita Domei Bandung. Bunyi teks proklamasi itu kemudian disalin dengan huruf-huruf besar dan ditempelkan pada papan tulis yang ada di depan kantor Domei di Jalan Dago Bandung. Bupati Bandung Suriasaputra melalui telepon memerintahkan agar menyebarluaskan berita itu. Dalam waktu singkat berita proklamasi itu telah tersebar ke berbagai pelosok daerah Bandung bahkan ke pelosok-pelosok Priangan.

Kota besar menjadi pusat pangkalan secara administratif dan militer. Arahan atas dibungkamnya informasi kemerdekaan Indonesia dilakukan juga, kepentingan Jepang agar tidak ada respon berlebih atas suka cita keluarnya dari penjajahan yang dikemudian akan mengusir kedudukan penjajah atas wilayahnya.

Penyampaian Informasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan upaya agar informasi ini tak terpantau kala penyebarannya oleh Jepang dan faktor kondisi masyarakat Indonesia pada waktu siang bekerja di ladang atau kebun. Malam hari dilakukan penyebaran informasi kemerdekaan. Beberapa kalangan pemuda pegawai kantor Radio Bandung untuk mengumumkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam warta berita.⁵ Dengan cara demikian mereka mengharapkan agar berita tersebut cepat tersiar di kalangan masyarakat.

Kelompok pegawai radio Bandung yang antara lain terdiri dari Sakti Alamsyah dan R.A. Darja melaksanakan rencana yang telah disusun. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan dari radio

⁵ Disjarahdam, *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Angkasa. 1979. hlm. 22

Bandung melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Berkat kerja sama antara pemuda pegawai radio Bandung dan kelompok pemuda PTT (Post Telegraf Telefoon) dengan menggunakan pemancar bergelombang pendek, berita proklamasi dapat disiarkan ke luar negeri dan berbagai penjuru di dalam negeri.⁶ Upaya dalam penyebaran informasi kemerdekaan dapat disiarkan untuk memberi pernyataan Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta ke berbagai wilayah luar dan dalam negeri yang terhubung untuk mengambil sinyal radio pemberitaan tersebut.

Suka Cita mendekati masyarakat Jawa Barat lainnya, informasi Proklamasi Kemerdekaan tersampaikan ke berbagai pelosok di Jawa Barat terkhusus Sukabumi. Ada yang melalui siaran radio dan ada pula yang menerima secara berangkai, baik melalui surat selebaran ataupun dari mulut ke mulut.⁷ Sorak-sorak pemuda dan masyarakat Sukabumi menyambut Proklamasi dengan diikuti menempelkan bendera merah putih di rumah-rumah penduduk dan di gedung-gedung sekitar. Rasa syukur tak lupa dilakukan dengan memanjatkan kepada Tuhan atas kenikmatan dan anugrah atas kemerdekaan ini. Tak lupa doa terpanjatkan terhadap para pejuang. Acara ini dipimpin oleh ulama setempat.⁸

⁶ Disjarahdam, *Op. Cit.* hlm 25

⁷ Nung Nurhayati dkk, *Op. Cit.* hlm. 12

⁸ Disjarahdam, *Op. Cit.* hlm. 26

2.3 Kondisi Sistem Pemerintahan Sukabumi Awal Kemerdekaan

Republik Indonesia telah memproklamkan menjadi negara merdeka. Upaya agar jalannya pemerintahan berjalan sesuai *Road Map* pemerintahan perlu diupayakan melalui tata kerja pemerintahan dan pendukungnya. Pada tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dalam rangka pembentukan perlengkapan pemerintah sipil, yaitu : Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Ditingkat daerah dilakukan untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KNID) dan BKR di tingkat Propinsi.⁹

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dilakukan sebelum pembentukan pemerintahan daerah terbentuk. Komite ini dibentuk untuk upaya peran warga negara terhadap negara dalam menjalankan pemerintahan dan membantu pemimpin-pemimpin dalam melakukan kewajibannya pada saat yang genting.

Tjahaya dalam Nung Nurhayati, dkk (2005) Pembentukan KNID di daerah Jawa Barat dimulai dari Keresidenan Priangan, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 1945. Jadi hanya dua hari setelah terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 22 Agustus 1945. Rapat pembentukan KNID Priangan dipimpin oleh Residen Priangan R. Puradiredja. Jumlah anggota KNID terdiri atas 23 orang dan 3 orang wakil dari peranakan Arab, Indo, dan Cina. Dalam rapat itu belum terpilih susunan pengurus yang lengkap, baru terpilih para anggota pimpinan umum yang dianggap mewakili

⁹ Nung Nurhayati dkk, *Loc. Cit.*

lapisan masyarakat Priangan. Mereka terdiri atas Dr. Suratman Erwin (Hokoo Kai), Moch. Syafei (Masyumi) Suprpto (Polisi), Bratanata (Fujin Kai), Ir. Ukar Bratakusumah (Barisan Pelopor), Sanusi Harjadinata (kaumSodagar), Mashudi (Pemuda), Anwar St. Pamuncak (Taiku Kai), Dr. Junjunan (Pencak Silat), K.H. Hidayat (Pekauman), Dr. Purwo (Kaum Tabib), Prof. Ir. Rooseno (Teknik), Ir. Abdul Karim (Kyooko Hokoo Kai), dan tokoh-tokoh yang dianggap penting (Ir. Pupela, Suntil, Mr. Mulyadi, Mr. Safrudin Prawiranegara. Kemudian pengurus umum ini membentuk Sekretariat yang dikepalai oleh Mr. Safrudin Prawiranegara dan tiga bagian yang terdiri atas Bagian Umum, Bagian Penyelidikan, dan bagian Perencanaan.¹⁰

Pada tanggal 25 Agustus 1945 Oto Iskandardinata dan Kasman Singodimejo (keduanya dari KNIP) memberikan ceramah di depan para anggota KNID Priangan. Kedua tokoh ini menjelaskan tujuan pembentukan Komite Nasional adalah untuk mendapatkan tenaga yang sebulat-bulatnya dari seluruh rakyat dan Komite Nasional harus memperlihatkan kebulatan cita-cita rakyat Indonesia yang ingin merdeka dan mampu menjadi benteng yang kokoh untuk membangun negara. Dalam rapat itu dibentuk pula Badan Eksekutif KNI Daerah Priangan dengan susunannya sebagai berikut:

Bagian Penerangan : Moch Syafei

Bagian Pernubungan : Ir. Abdul Karim

Bagian Kemakmuran : Sanusi Harjadinata

¹⁰ *Ibid.* hlm 13

Bagian Keseharan : Dr. Supardan

Bagian Keuangan : H.A. Gani¹¹

Pada suatu pertemuan tanggal 27 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Bogor di bawah pimpinan R.S. Suriadiraja bertempat di Balai Prajurit jalan Cilendek Bogor. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili daerah-daerah kotamadya dan kabupaten Bogor, kabupaten Sukabumi, dan kabupaten Cianjur. Susunan pengurus KNID keresidenan Bogor yang dibentuk dalam pertemuan tersebut adalah :

Ketua : R.S Suriadiraja, Wakil ketua : Umar Sanusi, Bendahara : Harun Kabir, Anggota : Enoch Danubrata (Polisi), S. Udaya (Pangreh Praja), Zahara (Pertanian), Sayuti (Perekonomian), Supardi (Angkutan Darat), Dr. Marzuki Mahdi (Penerangan).

Tjahaya, dalam Nung Nurhayati, dkk (2005) Tugas yang akang dilaksanakan yaitu: menjaga ketertiban umum dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia dan lain-lain yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pembentukan KNID di daerah Jawa Barat menjulur ke tingkat yang lebih kecil, bukan hanya keresidenan , dilanjutkan sampai ke tingkat kabupaten, kotapraja, kewedanaan dan kecamatan. Selanjutnya dengan ketetapan Undang-undang No. 1 tahun 1945 tanggal 23 Nopember 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala Daerah menjalankan

¹¹ *Ibid.* hlm 14

pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi daripadanya.¹²

Risalah sidang BPUPKI-PPKI ditingkat pemerintah pusat, dalam Berita Negara RI 1945 pembentukan pemerintahan ditingkat provinsi disampaikan. PPKI membentuk delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan masing-masing provinsi terdiri atas karesidenan-karesidenan yang dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Kedelapan provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Untuk Provinsi Jawa Barat pemerintah pusat telah menunjuk Mr. R. Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagai gubernur.¹³

Provinsi Jawa Barat dengan demikian lahir pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Mr. R. Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagai gubernurnya yang pertama dan berkedudukan di Jakarta. Pada bulan September 1945, kedudukan gubernur pindah ke Bandung sehingga Bandung menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 5 (lima) Karesidenan, yaitu Karesidenan Banten, Karesidenan Jakarta, Karesidenan Priangan, dan Karesidenan Cirebon. Tiap-tiap Karesidenan terbagi lagi dalam 18 kabupaten dan 5 kota otonom. Kabupaten Serang Pandeglang, dan Lebak termasuk

¹² *Ibid.* hlm. 15

¹³ Disjarahdam, *Op. Cit.* hlm. 30

karesidenan Banten, Kabupaten Jakarta, Jatinegara, Karawang dan kota otonom Jakarta termasuk kerisidenan Jakarta.

Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan kota otonom Bogor dan Sukabumi termasuk Karesidenan Bogor. Pengangkatan para bupati dan wali kota ditunjuk oleh para wakil rakyat di daerahnya masing-masing yang tergabung dalam KNID.